



Kabupaten Karanganyar



RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo 2018 - 2023 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode 2018 - 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018 - 2023.

Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dimaksud, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangrejo. Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik intern maupun extern organisasi, Kecamatan Gondangrejo untuk lima tahunan (2018–2023) bertekad mewujudkan visi dan misi sebagaimana direncanakan dalam renstra OPD ini. Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Renstra OPD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Renstra OPD ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur di Kabupaten Karanganyar yang tercinta ini.

Gondangrejo, 1 Januari 2018

CAMAT GONDANGREJO

JUNAIDI PURWANTO, SH.,MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19680607 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar..... v

Bab 1 Pendahuluan..... I-1

1. 1 Latar Belakang I-1

1. 2 Landasan Hukum I-5

1. 3 Maksud dan Tujuan I-8

1. 4 Sistematika Penulisan I-9

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... II-1

2. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... II-1

2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... II-4

2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-9

Bab 3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah..... III-1

3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... III-1

3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih..... III-2

3. 3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup..... III-8

3. 4 Penentuan Isu-isu Strategis..... III-12

Bab 4 Tujuan dan Saran..... IV-1

4. 1 Tujuan IV-1

4. 2 Saran..... IV-1

Bab 5 Strategi dan Kebijakan..... V-1

5. 1 Strategi V-1

5. 2 Kebijakan V-1

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan..... VI-1

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... VII-1

Bab 8 Penutup..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Banyaknya Dusun, Dukuh, RW Dan RT Tahun 2017	II-10
Tabel 2.2.	Jarak Kantor Desa Ke Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2017.....	II-11
Tabel 2.3.	Banyaknya Aparat Pemerintahan Tahun 2017.....	II-12
Tabel 2.4.	Banyaknya Anggota BPD, pengurus LPMD, Kader Pembangunan dan LPP Tahun 2017.....	II-13
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018	II-16
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018	II-17
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gondangrejo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	III-7
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gondangrejo berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-11
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023	IV-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023	V-2
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023	VI-5
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Kecamatan Gondangrejo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.....	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Perencanaan dan Keterkaitan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
Gambar 2.1.	Struktur organisasi Kecamatan Gondangrejo	II-4
Gambar 2.2.	Grafik Luas Wilayah menurut Penggunaan tahun 2017	II-9
Gambar 2.3.	Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Desa	II-10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Prinsip perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Konsep perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Konsep perencanaan pembangunan berdasarkan tahapannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah. Dari tahapan perencanaan tersebut, disusun dalam sebuah dokumen perencanaan yang meliputi pertama Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Kedua Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. ketiga Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dan keempat dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan. Dalam peraturan tersebut, kecamatan memiliki kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat memiliki fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa atau kelurahan. Selain itu kecamatan memiliki fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupateng yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.

Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini

merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, sementara RPJMD tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar saat ini.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo. Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar. RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan berpedoman pada Renstra OPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.
- d. Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Gondangrejo untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo ini. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Karanganyar.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

- 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023;
5. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023;
 6. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka menjabarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo menyusun perencanaan strategis (Renstra). Penyusunan Renstra ini merupakan bentuk kewajiban sebuah organisasi perangkat daerah yang digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023 harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Hal tersebut akan mempermudah dalam mengukur tingkat ketercapaian pembangunan pada satuan perangkat daerah dengan target pembangunan daerah yang lebih makro.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Renstra Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2019 – 2024 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Gondangrejo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gondangrejo ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo.
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangrejo dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karangnyar selama tahun 2018-2023.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Gondangrejo.
4. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gondangrejo selama kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan dan penentuan isu – isu strategis kecamatan.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi acuan dalam mengukur tercapainya proses-proses pembangunan di kecamatan.

5. Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menguraikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan dijalankan secara fokus pada program dan kegiatan.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Gondangrejo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan Nusawunngu Tahun 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Gondangrejo.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan perangkat daerah memuat informasi tentang gambaran umum wilayah, tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Gondangrejo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan. Susunan organisasi kecamatan meliputi Camat, Sekretaris, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum dan Kelurahan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

1. Camat

Camat memiliki tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, camat memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaa masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;

- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan, sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang mili/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan

perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

7. Seksi Pelayanan Umum

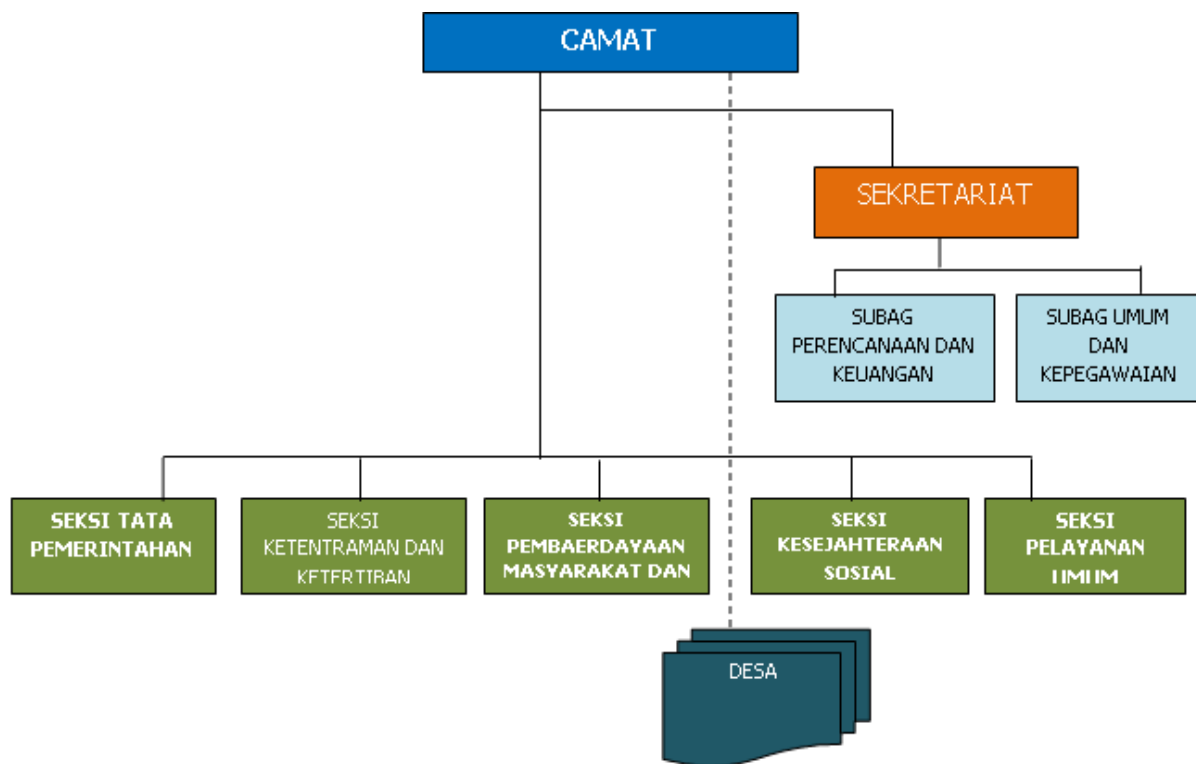
Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

8. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh lurah dan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kegiatan di kelurahan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Gondangrejo dapat dilihat pada bagan berikut di bawah ini.



Gambar 2.1.
Struktur organisasi Kecamatan Gondangrejo

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Gondangrejo adalah seluruh aparatur ditingkat kecamatan dengan melihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan, jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan status kepegawaian.

No	Golongan Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV	5		5
2	III	11	5	16
3	II	3		3
4	I	1		1

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3			

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
2	S2	7		7
3	S1	7	5	12
4	D3			
5	SMA/SMK	4		4
6	SMP/MTs	2		2

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	19	6	25
2	Non PNS	2		2
	Total			27

2. Sumberdaya Asset/Modal

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Gondangrejo dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Gondangrejo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi	Jumlah
1.	Tanah Bang. Kantor Pemerintah		2002	Baik	1
2.	Station Wagon		2018	Baik	1
3.	Sepeda Motor		2003	Baik	1
4.	Sepeda Motor		2005	Baik	1
5.	Sepeda Motor		2017	Baik	1
6.	Mesin Tik Man (14-16)		1987	Kurang Baik	1
7.	Almari Besi/Metal		1982	Baik	1
8.	Rak Besi / Metal		1982	Kurang Baik	2
9.	Filling Besi/Metal		2004	Baik	2
10.	Filling Besi/Metal		2006	Baik	2
11.	Filling Besi/Metal		2012	Baik	3
12.	Filling Besi/Metal		2015	Baik	1
13.	Lemari Kaca		2018	Baik	1

No	Jenis Barang	Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi	Jumlah
14.	Papan Visual		1986	Baik	1
15.	Papan Visual		1987	Baik	1
16.	Papan Visual		1987	Baik	1
17.	Lemari Kayu		1982	Baik	6
18.	Lemari Kayu		2013	Baik	2
19.	Meja Kayu / Rotan		1982	Baik	4
20.	Kursi Besi / Metal		1986	Baik	47
21.	Kursi Besi / Metal		2015	Baik	3
22.	Kursi Kayu / Rotan		1986	Baik	2
23.	Kursi Kayu / Rotan		1987	Baik	41
24.	Kursi Kayu / Rotan		2008	Baik	2
25.	Tempat Tidur Kayu		2013	Baik	2
26.	Meja Rapat		2018	Baik	7
27.	Meja Resepsionis		2015	Baik	1
28.	Meja Resepsionis		2015	Baik	1
29.	Kursi Tamu		1986	Baik	2
30.	Kursi Tamu		2014	Baik	1
31.	Kursi Tamu		2018	Baik	1
32.	Kursi Putar		1986	Baik	6
33.	Kursi Putar		2008	Baik	2
34.	Kursi Putar		2008	Baik	1
35.	Kursi Biasa		2012	Baik	9
36.	Kursi Lipat		1986	Baik	36
37.	Kursi Lipat		1986	Kurang Baik	1
38.	Kursi Lipat		2005	Baik	25
39.	Kursi Lipat		2015	Baik	3
40.	Kursi Lipat		2015	Baik	50
41.	Kursi Lipat		2016	Baik	20
42.	Meja 1/2 Biro		1982	Baik	17
43.	Meja 1/2 Biro		1999	Baik	5
44.	M.Potong Rumput		2014	Baik	1
45.	M.Potong Rumput		2014	Baik	1
46.	Lemari Es		2015	Baik	1
47.	Ac Unit		2014	Baik	1
48.	Ac Unit		2017	Baik	1
49.	Ac. Split		2015	Baik	1
50.	Kipas Angin		2010	Baik	2
51.	Televisi		2014	Baik	1

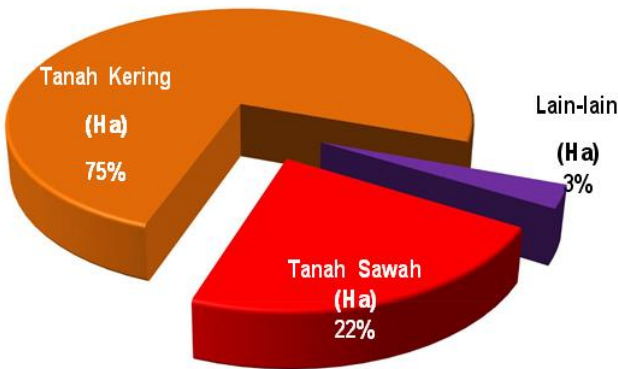
No	Jenis Barang	Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi	Jumlah
52.	Cassete Recorder		1999	Baik	1
53.	Sound System		2007	Baik	1
54.	Ware Less		2010	Baik	1
55.	G.Presiden/Wk.Presiden		2001	Kurang Baik	1
56.	Alat Rumah Tangga Lainnya		2013	Baik	1
57.	Alat Rumah Tangga Lainnya		2014	Baik	1
58.	Alat Rumah Tangga Lainnya		2014	Baik	1
59.	Alat Rumah Tangga Lainnya		2014	Baik	1
60.	Alat Rumah Tangga Lainnya		2015	Baik	2
61.	Alat Rumah Tangga Lainnya		2015	Baik	1
62.	Alat Pemadam Portable		2004	Baik	1
63.	Komputer Unit /Jaringan Lainnya		2012	Baik	1
64.	P.C. Unit		2013	Baik	1
65.	P.C. Unit		2015	Baik	1
66.	P.C. Unit		2016	Baik	1
67.	P.C. Unit		2017	Baik	1
68.	Lap Top		2011	Baik	1
69.	Lap Top		2012	Baik	1
70.	Lap Top		2013	Baik	1
71.	Lap Top		2016	Baik	1
72.	Lap Top		2018	Baik	1
73.	Printer		2015	Baik	1
74.	Printer		2016	Baik	1
75.	Printer		2017	Baik	1
76.	Printer		2009	Baik	1
77.	Printer		2012	Baik	2
78.	Printer		2018	Baik	2
79.	Printer		2018	Baik	1
80.	Peralatan Jaringan Lainnya		2013	Kurang Baik	1
81.	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii		1987	Baik	1

No	Jenis Barang	Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi	Jumlah
82.	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii		1987	Baik	5
83.	Meja Kerja Pejabat		2008	Baik	2
84.	Meja Kerja Pejabat		2018	Baik	2
85.	Meja Kerja Pejabat		2018	Baik	3
86.	Meja Rapat Pejabat		1985	Baik	10
87.	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii		1986	Baik	1
88.	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii		2005	Baik	1
89.	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii		2012	Baik	1
90.	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii		2012	Baik	1
91.	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv		2012	Baik	3
92.	Kursi Kerja Pejabat		2018	Baik	3
93.	Buffet Kayu		1986	Baik	4
94.	Camera+Attachment		2016	Baik	1
95.	Slide Projector		2012	Baik	1
96.	Sound System		2013	Baik	1
97.	Telephone (Pabx)		1999	Baik	1
98.	Telephone (Pabx)		2016	Baik	5
99.	Gedung Kantor Permanen		2002	Baik	1
100	Pagar		2012	Baik	1
101	Bang.Ged.Pertem. Permanen		2006	Baik	1
102	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		2015	Baik	1
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		2015	Baik	1
104	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		2015	Baik	1
105	Rtt.Gol.II Perm.Kls. Ia		2005	Kurang Baik	1
106	Management & Perkantoran		2003	Rusak Berat	404
107	Management & Perkantoran		2003	Rusak Berat	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 23,0 km arah barat.Ketinggian rata-rata 150 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Gondangrejo meliputi sebelah utara Kabupaten Sragen, sebelah selatan Kota Surakarta, sebelah barat Kabupaten Boyolali dan sebelah timur Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat.

Luas wilayah Kecamatan Gondangrejo adalah 4.891.22 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.083.470 Ha, dan luas tanah kering 3.659.867 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 0,00 Ha, ½ teknis 0,00 Ha, sederhana 0,00 Ha dan tadah hujan 937.33 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/ bangunan 1.420,99 Ha dan luas untuk tegalan/ladang 2.665.21 Ha.



Gambar 2.2.
Grafik Luas Wilayah menurut Penggunaan tahun 2017

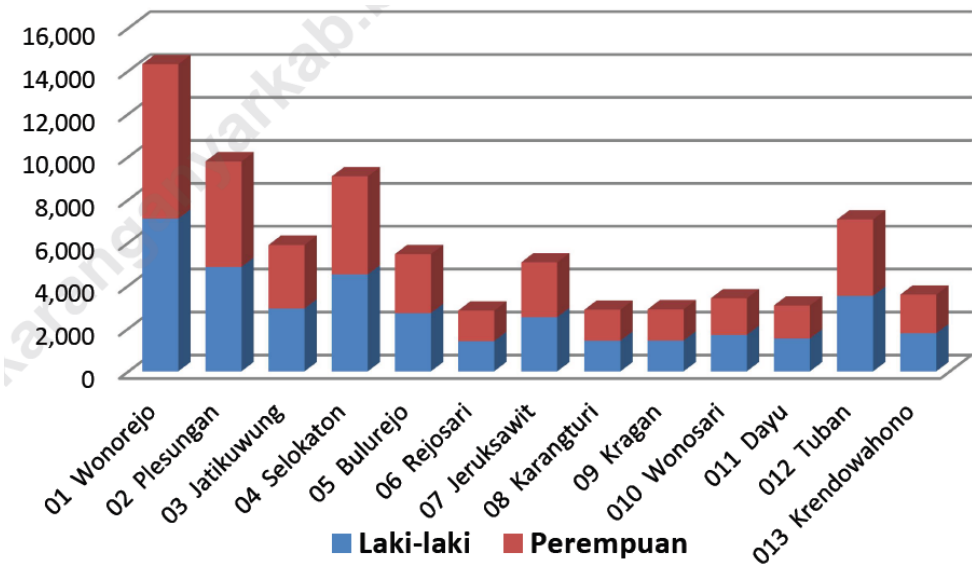
Kecamatan Gondangrejo terdiri dari 13 desa, 78 dusun, 166 dukuh, 117 RW dan 512 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada. Desa dengan jumlah dusun paling banyak mencapai 7 dusun, jumlah dukuh terbanyak mencapai 20 dukuh, jumlah RW terbanyak mencapai23 RW dan jumlah RT terbanyak mencapai 86 RT. Pembagian wilayah dusun, dukuh, RW dan RT pada masing-masing desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Banyaknya Dusun, Dukuh, RW Dan RT Tahun 2017

DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Wonorejo	6	11	23	86
02 Plesungan	6	20	12	65
03 Jatikuwung	7	12	8	38
04 Selokaton	7	13	15	56
05 Bulurejo	5	11	7	37
06 Rejosari	4	7	5	21
07 Jeruksawit	7	15	7	32
08 Karangturi	6	17	6	28
09 Kragan	7	16	7	30
010 Wonosari	7	14	7	33
011 Dayu	5	11	6	37
012 Tuban	6	9	9	39
013 Krendowahono	5	10	5	23
JUMLAH	78	166	117	525

Sumber : Monografi Desa

Jumlah Penduduk di Kecamatan Gondangrejo tahun 2017 sebanyak 79.745 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 39.560 jiwa dan perempuan 40.185 jiwa.



Gambar 2.3.
Persebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Desa

Jarak dari desa ke kantor kecamatan paling jauh adalah Desa Karangturi yaitu 18 KM dan Desa Kragan sejauh 15 KM. Sementara itu jarak desa terjauh ke pusat pemerintahan kabupaten yaitu Desa Kragan sejauh 29 KM, Desa Tuban, Krendowahono sejauh 28 KM dan Desa Dayu sejauh 27 KM.

Tabel 2.2
Jarak Kantor Desa Ke Pusat Pemerintahan Kecamatan
dan Kabupaten Tahun 2017

DESA	Ketinggian Rata-Rata dpl (m)	Jarak dari Kantor Desa ke ... (km)	
		Kantor Kecamatan	Kantor Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Wonorejo	115	10.00	22.00
02 Plesungan	115	12.00	13.00
03 Jatikuwung	161	7.00	23.00
04 Selokaton	126	4.50	22.00
05 Bulurejo	132	1.50	25.00
06 Rejosari	168	4.00	27.00
07 Jeruksawit	129	12.00	20.00
08 Karangturi	99	18.00	25.00
09 Kragan	99	15.00	29.00
010 Wonosari	117	11.00	26.00
011 Dayu	159	2.50	27.00
012 Tuban	123	0.20	28.00
013 Krendowahono	145	1.50	28.00
Rata - rata	130	7.63	24.23

Dihat berdasarkan jumlah apartur desa sebagai pembantu kepala desa, rata-rata desa di Kecamatan Gondangrejo memiliki 4-6 kaur. Namun pada tahun 2017, ada satu desa dengan jumlah kaur paling sedikit yaitu Desa Krendowahono hanya 3 kaur. Jumlah aparatur desa dari masing-masing kecamatan persebarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Banyaknya Aparat Pemerintahan Tahun 2017

DESA	Lurah / Kades	SEKDES	KADUS	KAUR	STAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Wonorejo	1	1	6	5	-
02 Plesungan	1	1	6	5	-
03 Jatikuwung	1	1	7	5	-
04 Selokaton	1	1	7	5	-
05 Bulurejo	1	1	5	5	-
06 Rejosari	1	1	4	5	-
07 Jeruksawit	1	1	7	4	-
08 Karangturi	1	1	6	5	-
09 Kragan	1	1	7	6	-
010 Wonosari	1	1	7	6	-
011 Dayu	1	1	5	5	-
012 Tuban	1	1	6	6	-
013 Krendowahono	1	1	5	3	-
JUMLAH	13	13	78	65	-

Sumber : Monografi Desa

Dari sisi jumlah kelembagaan ditingkat desa, setiap desa memiliki anggota BPD sebanyak 11 orang, dengan total jumlah anggota BPD sebanyak 143 orang. Jumlah pengurus LPMD sebanyak 152 orang dengan paling banyak 18 orang dan paling sedikit sebanyak 9 orang. Jumlah kader pembangunan sebanyak 218 orang, dengan desa Tuban memiliki jumlah kader terbanyak sebanyak 72 orang.

Tabel 2.4
Banyaknya Anggota BPD, pengurus LPMD, Kader Pemb, dan LPP
Tahun 2017

DESA	ANGGOTA BPD	PENGURUS LPMD	Kader Pembangunan	PENGURUS LPP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Wonorejo	11	13	5	10
02 Plesungan	11	13	12	38
03 Jatikuwung	11	9	7	18
04 Selokaton	11	18	14	16
05 Bulurejo	11	11	4	10
06 Rejosari	11	12	7	19
07 Jeruksawit	11	11	5	16
08 Karangturi	11	10	16	11
09 Kragan	11	12	45	12
010 Wonosari	11	12	16	9
011 Dayu	11	11	15	18
012 Tuban	11	11	72	32
013 Krendowahono	11	9	-	20
JUMLAH	143	152	218	229

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Gondangrejo ditunjukkan berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gondangrejo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Gondangrejo selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Gondangrejo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Gondangrejo setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Gondangrejo setiap tahunnya mengalami pembaharuan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Gondangrejo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan dan semakin meningkat harga barang di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Gondangrejo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangrejo
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17
1	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	% wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	% wilayah tertib perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	90	100
4	% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	80	80	80	80	90	80	80	80	80	90
5	% Desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	% kehadiran musrenbang	%	100	100	100	100	100	90	90	90	80	88	90	90	90	80	88
7	Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	%	100	100	100	100	100	99,9	100	99,9	97	96,7	99,9	100	99,9	97	96,7
8	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	100	100	100	100	100	86,1	95	86,1	87,8	83,5	86,1	95	86,1	87,8	83,5
9	Pembayaran jasa kebersihan kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,8	100	100	100	100	98,8
10	Tersedianya alat tulis kantor	%	100	100	100	100	100	99,3	100	99,3	100	95,3	99,3	100	99,3	100	95,3

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gondangrejo
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.230.000	117.910.000	139.945.000	146.860.000	143.800.000	71.305.348	113.406.095	132.851.622	142.995.967	139.245.210
Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	3.700.000	2.500.000	2.700.000	3.500.000	2.700.000	3.700.000	2.500.000	2.700.000	3.500.000
Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air & Listrik	20.400.000	20.400.000	37.945.000	20.400.000	20.400.000	13.475.348	15.896.095	30.852.622	16.549.667	15.865.210
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			25.200.000	25.200.000	25.200.000			25.200.000	25.200.000	25.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.000.000	14.000.000	14.000.000	16.230.000	16.500.000	9.000.000	14.000.000	13.999.000	16.230.000	16.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.150.000	5.110.000	4.550.000	9.700.000	5.000.000	4.150.000	5.110.000	4.550.000	9.700.000	5.000.000
Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/pen. bangunan kntr		4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	6.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	6.180.000
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	9.080.000	15.000.000	11.000.000	18.480.000	14.600.000	9.080.000	15.000.000	11.000.000	18.480.000	14.600.000
Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dlm/luar daerah		50.300.000	35.350.000	43.750.000	35.000.000		50.300.000	35.350.000	43.743.000	35.000.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas	24.500.000				10.000.000	23.500.000				10.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	160.500.000	164.840.000	110.180.000	78.500.000	107.000.000	155.609.000	163.036.500	109.254.500	76.214.300	106.168.650
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000	5.000.000	20.000.000		35.000.000	8.000.000	4.980.000	19.960.000		35.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	20.000.000	20.000.000		20.500.000	7.000.000	20.000.000	19.137.500		20.400.000
Pengadaan Komputer	9.000.000					9.000.000				
Pengadaan Perlengkapan Kerja										
Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor				25.000.000					22.900.000	
Pemeliharaan rumah dinas		5.000.000	15.000.000	5.000.000			5.000.000	15.000.000	5.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	19.500.000	8.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	19.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	26.500.000	37.040.000	28.880.000	26.500.000	32.000.000	26.000.000	36.806.500	28.877.000	26.314.300	31.268.650
Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2.000.000	6.800.000	6.800.000	7.000.000		2.000.000	6.800.000	6.800.000	7.000.000	
Pengadaan Skat Ruang Kantor	10.000.000					10.000.000				
Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas	30.000.000					28.873.000				
Pembangunan Garasi Rumah Dinas	20.000.000					18.636.000				
Rehab Sedang Berat Garasi	40.000.000					38.100.000				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kantor										
Pembangunan Tempat Parkir Kantor		46.000.000					45.230.000			
Pembangunan/Penataan Taman Kantor		25.000.000					24.220.000			
Pembangunan Papan Nama Kantor		5.000.000					5.000.000			
Penambahan Daya Listruk Rumah Dinas/Rumah Jabatan			3.500.000					3.500.000		
Pengadaan Instalsi Listrik, Telepon dan Jaringan			11.000.000					10.980.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.800.000	20.700.000	35.200.000	35.200.000	39.200.000	15.050.000	20.700.000	35.200.000	35.200.000	39.200.000
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	12.380.000	17.700.000	34.200.000	34.200.000	37.200.000	11.680.000	17.700.000	34.200.000	34.200.000	37.200.000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	14.000.000	28.730.000	21.950.000	156.300.000	39.000.000	14.000.000	25.155.000	21.950.000	144.800.000	38.295.000
Pembinaan Linmas/Kamtibmas	5.000.000	7.000.000	3.000.000	138.000.000	10.000.000	5.000.000	5.925.000	3.000.000	126.500.000	9.295.000
Pembinaan Wilayah / Daerah	9.000.000	10.000.000	18.950.000	18.300.000	29.000.000	9.000.000	7.500.000	18.950.000	18.300.000	29.000.000
Forum Komunikasi Pimpinan		11.730.000					11.730.000			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kecamatan										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				25.000.000					24.982.000	
Sosialisasi Penanggulangan Bencana				25.000.000					24.982.000	
Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.000.000	20.000.000	35.000.000	67.000.000	227.000.000	3.000.000	18.775.000	35.000.000	67.000.000	186.744.500
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	3.000.000			7.000.000	12.000.000	3.000.000			7.000.000	12.000.000
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan		20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000		18.775.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
Fasilitasi Paskibraka Kecamatan			20.000.000	40.000.000	50.000.000			20.000.000	40.000.000	49.744.500
Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya					30.000.000				30.000.000	30.000.000
Festival Seni Budaya					75.000.000				75.000.000	75.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah					40.000.000				0	0
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		7.000.000	7.000.000	15.000.000	15.000.000		7.000.000	7.000.000	15.000.000	15.000.000
Pembinaan PKK Kecamatan		7.000.000	7.000.000	15.000.000	15.000.000		7.000.000	7.000.000	15.000.000	15.000.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	8.000.000	19.000.000	15.000.000	28.000.000	35.000.000	8.000.000	19.000.000	15.000.000	28.000.000	35.000.000
Pelaksanaan Musyawarah	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	15.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	15.000.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pembangunan Desa										
Evaluasi, Pemberdayaan Masy., Perlombaan Desa	4.000.000	15.000.000	11.000.000	20.000.000	20.000.000	4.000.000	15.000.000	11.000.000	20.000.000	20.000.000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	14.000.000	9.000.000	6.900.000	39.250.000	212.875.000	14.000.000	8.235.000	6.900.000	35.800.000	55.955.000
Pembinaan Perangkat Desa	4.000.000	4.000.000		7.000.000	10.000.000	4.000.000	3.310.000		7.000.000	9.580.000
Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintah Desa	5.000.000	5.000.000	3.500.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	4.925.000	3.500.000	10.000.000	10.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000					5.000.000				
Fasilitasi Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar			3.400.000	17.250.000	6.000.000			3.400.000	13.800.000	6.000.000
Pembinaan Pengurus RT dan RW					156.500.000					0
Monev Alokasi Dana Desa				5.000.000	30.375.000				5.000.000	30.375.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		20.000.000	2.200.000	12.000.000	12.000.000		20.000.000	2.200.000	12.000.000	12.000.000
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan		20.000.000	2.200.000	12.000.000	12.000.000		20.000.000	2.200.000	12.000.000	12.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				10.000.000	20.000.000				10.000.000	20.000.000
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				10.000.000	20.000.000				10.000.000	19.685.000
	294.530.000	408.180.000	373.375.000	633.110.000	850.875.000	280.964.348	395.307.595	365.356.122	611.992.267	647.293.360

1.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Tuntutan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Peluang

- a. Menciptakan aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif dalam mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membangun sistem layanan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan teknologi informasi.
- c. Memperkuat kelembagaan ditingkat desa maupun kelurahan dan pelibatan pihak lain di luar pemerintah seperti CSR dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Gondangrejo adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan.
3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelesaian pertanahan di Wilayah Kecamatan Gondangrejo.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyediaan data antara desa/kelurahan dan kecamatan.
5. Masih adanya potensi kerawanan lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat.
6. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
7. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
8. Belum optimalnya pemenuhan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Gondangrejo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi:

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga

masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi,

pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus

dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha

mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan

internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Gondangrejo menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pencapaian misi 5 yaitu peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Misi ini memiliki tujuan terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, tata kelola pemerintahan yang baik, berprestasi, dan kesetaraan gender dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gondangrejo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga Tujuan Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, tata kelola pemerintahan yang baik, berprestasi, dan kesetaraan gender Sasaran	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah Utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat dan Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) Hektar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
9. pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
11. pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan
12. peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mempedomani Peraturan daerah Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar maka untuk Kecamatan Gondangrejo dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Struktur Ruang

Terdapat beberapa Program/Kegiatan terkait dengan Rencana Perumusan Struktur Ruang di Kecamatan Gondangrejo diantaranya:

1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten di Kecamatan Gondangrejo terdiri dari PPK
2. Rencana pengembangan terminal meliputi Rencana peningkatan tipe terminal dari Tipe C menjadi Tipe B, yaitu Terminal Gondangrejo dan terminal Tuban Gondangrejo;
3. Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi pembangunan tampungan air baku.
4. Rencana pengembangan jaringan sumber air minum kota meliputi peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA) melalui Brondcaptering dan Pipa distribusi
5. Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi meliputi jalur evakuasi bencana longsor menuju ruang evakuasi.

b. Rencana Pola Ruang

Terkait dengan Pola Ruang arahan RTRW untuk Kecamatan Gondangrejo adalah sebagai berikut:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air. dengan luas kurang lebih 7.061 (tujuh ribu enam puluh satu) hektar
- Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sekitar mata air berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air seluas kurang lebih 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hektar
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan resapan/imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali.
- Kawasan perlindungan plasma nutfah
- Kawasan pertanian tanaman pangan

- Kawasan pertanian tanaman pangan
 - Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili
 - Kawasan peternakan sapi meliputi Desa Tohkuning dan Desa Doplang, Peternakan domba/kambing meliputi Desa Tohkuning
 - Kawasan peruntukan perikanan budidaya
 - Kawasan pertambangan mineral meliputi tanah liat
 - Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
 - Kawasan pertambangan panas bumi
 - kawasan wisata alam meliputi Sendang Kuning,
 - Pengembangan wisata budaya meliputi Pure Pemacekan.
 - Desa wisata
- c. Rencana Penetapan Kawasan Strategis
- kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gondangrejo berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencanajaringan air baku dan air minum perkotaan serta Jalur evakuasi bencana alam	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada,namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam RTRW, kecamatan	Kurangnya koordinasi SKPD terkait dengan kecamatan	Kondisi wilayah yang strategis

		belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan		
--	--	---	--	--

3.3.2. Telaah Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian ananlisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Rencana dan Program, tidak terdapat KRP yang terkait langsung dengan Tupoksi OPD Kecamatan yang perlu dilakukan perbaikan KRPnya.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada masing-masing seksi beserta anaisis keterkaitan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati, maka permasalahan strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan.
3. Masih kurangnya koordinasi antar kelembagaan baik secara internal maupun eksternal dalam menyelesaikan persoalan dimasyarakat.

4. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar adalah **Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan.**

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo. Sasaran utama pembangunan di Kecamatan Gondangrejo adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Diwujudkan Dengan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gondangrejo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gondangrejo
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Gondangrejo adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya kecamatan yang dimiliki dalam mendukung pelayanan kecamatan melalui optimalisasi dan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pelayanan.
2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan melalui pembinaan, sosialisasi maupun kunjungan rutin baik melalui pemerintahan desa maupun langsung kepada masyarakat.

4.2 Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Gondangrejo, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan komitmen aparat kecamatan dengan prioritas pada aparatur yang bertugas pada pelayanan “front liner” dan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan yang berhubungan dengan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan terutama pada jenis-jenis pelayanan kategori Pelayanan Adminsitasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Peningkatan kualitas kelembagaan internal kecamatan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dan fasilitasi internal

- dan hubungan kemasyarakatan pada berbagai kesempatan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat yang difokuskan pada penguatan koordinasi terhadap kelembagaan yang ada ditingkat desa ataupun kelurahan serta melakukan pendekatan musyawarah pada penyelesaian berbagai persoalan dimasyarakat.

Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Gondangrejo
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan sumberdaya kecamatan yang dimiliki dalam mendukung pelayanan kecamatan melalui optimalisasi dan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pelayanan. 2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan	1. Peningkatan komitmen aparat kecamatan dengan prioritas pada aparatur yang bertugas pada pelayanan “front liner” dan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan yang berhubungan dengan masyarakat. 2. Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan melalui pembinaan, sosialisasi maupun kunjungan rutin baik melalui pemerintahan desa maupun langsung kepada masyarakat.	kualitas pelayanan terutama pada jenis-jenis pelayanan kategori Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 3. Peningkatan kualitas kelembagaan internal kecamatan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dan fasilitasi internal dan hubungan kemasyarakatan pada berbagai kesempatan pelaksanaan program dan kegiatan. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat yang difokuskan pada penguatan koordinasi terhadap kelembagaan yang ada

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			ditingkat desa ataupun kelurahan serta melakukan pendekatan musyawarah pada penyelesaian berbagai persoalan dimasyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan di Kecamatan Gondangrejo. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Kom. Sumber Daya Air & Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/pen. bangunan kntr
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dlm/luar daerah
- k. Penyediaan Bahan Logistik Rumah Dinas
- l. Penyediaan Jasa Operasional Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Komputer
- d. Pengadaan Perlengkapan Kerja
- e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor
- f. Pemeliharaan rumah dinas
- g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops
- i. Pemeliharaan peralatan gedung kantor
- j. Pengadaan Skat Ruang Kantor
- k. Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas

- l. Pembangunan Garasi Rumah Dinas
- m. Rehab Sedang Berat Garasi Kantor
- n. Pembangunan Tempat Parkir Kantor
- o. Pembangunan/Penataan Taman Kantor
- p. Pembangunan Papan Nama Kantor
- q. Penambahan Daya Listrik Rumah Dinas/Rumah Jabatan
- r. Pengadaan Instansi Listrik, Telepon dan Jaringan

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan Renstra OPD
- b. Penyusunan Renja OPD
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
- d. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan Teknis dan Kursus Keterampilan

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan rencana kegiatan :

- a. Pembinaan Linmas/Kamtibmas
- b. Pembinaan Wilayah / Daerah
- c. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan rencana kegiatan :

- a. Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan

7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan rencana kegiatan :

- a. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

8. Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan rencana kegiatan :

- a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- b. Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan
- c. Fasilitasi Paskibraka Kecamatan
- d. Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya
- e. Festival Seni Budaya
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah

9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan rencana kegiatan :

- a. Pembinaan PKK Kecamatan
- 10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan rencana kegiatan :**
 - a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
 - b. Evaluasi, Pemberdayaan Masy., Perlombaan Desa
- 11. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan rencana kegiatan :**
 - a. Pembinaan Perangkat Desa
 - b. Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintah Desa
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - d. Fasilitasi Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar
 - e. Pembinaan Pengurus RT dan RW
 - f. Monev Alokasi Dana Desa
- 12. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan rencana kegiatan :**
 - a. Sosialisasi Penanggulangan Bencana
- 13. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah, dengan rencana kegiatan :**
 - a. Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban
 - b. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum
 - c. Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial
 - d. Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat
 - e. Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangk at daerah Penangg ungjawa b
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
Meningkat kan pembangu nan kewilayah a n dan pelayanan kecamatan	Meningkat nya kualitas pelayanan kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	111.700	100	317.740	100	270.314	100	297.345	100	327.080	100	1.540.179	Kec. Gondan grejo
		Penyediaan jasa surat menyurat	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Surat	1.350	1350	3.300	1350	7.260	1.350	7.986	1350	8.785	1.350	9.663	1.350	36.974	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	10.000	12	22.000	12	24.200	12	26.620	12	29.282	12	112.102	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhnya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	36.000	12	79.200	12	87.120	12	95.832	12	105.415	12	403.567	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Item	21	21	10.000	21	22.000	21	24.200	21	26.620	21	29.282	21	112.102	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Item	3	3	5.000	3	11.000	3	12.100	3	13.310	3	14.641	3	56.051	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	5.000	12	11.000	12	12.100	12	13.310	12	14.641	12	56.051	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhnya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	5.000	12	11.000	12	12.100	12	13.310	12	14.641	12	56.051	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	Bulan	12	12	2.400	12	5.280	12	5.808	12	6.389	12	7.028	12	26.905	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan	Bulan	12	12	15.000	12	33.000	12	36.300	12	39.930	12	43.923	12	168.153	

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat at daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	15.000	12	33.000	12	36.300	12	39.930	12	43.923	12	168.153	
		Penyediaan bahan logistik rumah dinas	Tersedianya bahan logistik rumah dinas	Bulan	12	12	5.000	12	11.000	12	12.100	12	13.310	12	14.641	12	56.051	
		Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran	Tercukupinya operasional kantor lebih memadai	Bulan	12	12	0	12	72.000	12	72.000	12	72.000	12	72.000	12	288.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	31.800	100	519.960	100	76.956	100	84.652	100	93.117	100	866.485	Kec. Gondan grejo
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Unit				14	50.000		0	0	0	0	0	14	50.000	
		Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Unit				3	10.000		0	0	0	0	0	3	10.000	
		Pembangunan Gedung Kantor (Penambahan Ruang)	Tersediannya gedung yang memadai	lokal	0	0	0	1	150.000	0	0	0	0	0	0	1	150.000	
		Pengadaan Kendaraan dinas/ oprasional	Tercukupinya kendaraan dinas kantor	Buah	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
		Pengadaan mebeleir	Meningkatnya perlengkapan kantor yang memadai	Buah	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas mendapatkan pemeliharaan rutin	Lokal	1	1	5.000	1	11.000	1	12.100	1	13.310	1	14.641	1	56.051	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	1	1	5.000	1	11.000	1	12.100	1	13.310	1	14.641	1	56.051	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan	4	4	16.800	4	36.960	4	40.656	4	44.722	4	49.194	4	188.241	

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat at daerah Penangg ungjawa b
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Item	6	6	5.000	6	11.000	6	12.100	6	13.310	6	14.641	6	56.051	
		Rehabilitasi Mushola Kantor	Tercukupinya tempat ibadah yang memadai	Buah	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
		Pembangunan Bak Penampungan dan Distribusi Air	Tercukupinya bak penampungan dan distribusi air	Buah	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	20.000	100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	22.500	100	110.000	Kec. Gondan grejo
		Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen terusun	Buku	8	8	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20.000	
		Penyusunan Renja OPD	Jumlah dokumen terusun	Buku	0	0	0	10	7.500	10	7.500	10	7.500	10	7.500	10	30.000	
		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah dokumen terusun	Buku	5	0	0	10	7.500	10	7.500	10	7.500	10	7.500	10	30.000	
		Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen terusun	Buku	5	0	0	10	7.500	10	7.500	10	7.500	10	7.500	10	30.000	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0	0	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	10.000	Kec. Gondan grejo
		Bimbingan teknis dan kursus keterampilan	Jumlah aparat yang lulus mengikuti bimbingan teknis dan kursus keterampilan	orang		0	0	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	2.500	5	10.000	
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Gondan grejo

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangk at daerah Penangg ungjawa b
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
		Pembinaan Linmas/Kamtibmas	Jumlah linmas yang dibina	Orang	80	80	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pembinaan Wilayah/Daerah	Jumlah desa yang dibina	Desa	13	13	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	%	100	100	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Gondan grejo
		Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya fasilitasi kegiatan paten	Kegiatan	1	1	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan	%	80	80	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Gondan grejo
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah desa mengikuti kegiatan kepemudaan	Desa	13	13	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan	%	100	100	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Gondan grejo
		Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi	kegiatan	1	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan FKUB tingkat kecamatan	kegiatan	1	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	Jumlah paskribaka yang terfasilitasi	orang	1	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya	Jumlah kegiatan keagamaan dan sosial budaya yang difasilitasi	kegiatan	13	13	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Festival Seni Budaya	Jumlah kegiatan festivasl seni budaya yang difasilitasi	kegiatan	1	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat at daerah Penanggunjawa b
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
		Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Jumlah orang mengikuti pelaksanaan kegiatan daerah	kegiatan	120	120	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kelembagaan PKK yang dibina	%	100	100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Gondan grejo
		Pembinaan PKK Kecamatan	Terpenuhinya fasilitasi pembinaan PKK	Bulan	12	12	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang	%	100	100	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Gondan grejo
		Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah desa mengikuti musrenbang	Desa	13	13	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan desa/kelurahan	Jumlah desa mengikuti lomba	Kegiatan	13	13	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	100	100	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kec. Gondan grejo
		Pembinaan Perangkat Desa	Jumlah desa mengikuti pembinaan perangkat desa	Desa	13	13	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa mengikuti pembinaan kegiatan administrasi pemerintahan desa	Desa	13	13	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa mengikuti penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Desa	12	12	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat at daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
		Fasilitasi Pengisian Kekosongan Formasi Jabatan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar	Jumlah desa mengikuti fasilitasi pengisian kekosongan formasi jabatan	Desa	4	4	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pembinaan pengurus RT dan RW	Jumlah pengurus RT dan RW mendapatkan pembinaan	Orang	130	130	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Monev Alokasi Dana Desa	Jumlah desa mengikuti monev alokasi dana desa	Desa	13	13	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pembekalan Anggota BPD	Jumlah desa mengikuti pembekalan anggota BPD	Desa	13	13	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi penanggulangan bencana	%	100	100	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Gondan grejo
		Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Orang	140	140	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	0	100	591.800	100	650.980	100	716.078	100	787.693	100	2.746.551	Kec. Gondan grejo
			% wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100		100		100		100		100		100		
			% wilayah tertib perda	%	100	100		100		100		100		100		100		
			% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100		100		
			% Desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	98	99,2		99,5		99,6		99,7		99,7		99,7		
			% kehadiran musrenbang	%	97	98,3		98,7		99,1		99,2		99,2		99,2		

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangk at daerah Penangg ungjawa b
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
		Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	Kegiata n	2	-	-	2	107.800	2	118.580	2	130.438	2	143.482	2	500.300	Kec. Gondan grejo
			Jumlah linmas yang dibina	Orang	80	-	-	80	22.000	80	24.200	80	26.620	80	29.282	80	102.102	
			Jumlah desa yang dibina	Desa	13	-	-	13	85.800	13	94.380	13	103.818	13	114.200	13	398.198	
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	Kegiata n	1	-	-	1	26.400	1	29.040	1	31.944	1	35.138	1	122.522	Kec. Gondan grejo
			Terpenuhinya fasilitasi kegiatan pelayanan paten	Kegiatan	1	-	-	1	26.400	1	29.040	1	31.944	1	35.138	1	122.522	
		Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan sosial	Jumlah kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial	Kegiata n	8	-	-	8	297.000	8	326.700	8	346.060	8	380.666	8	1.350.426	Kec. Gondan grejo
			Jumlah desa mengikuti kegiatan kepemudaan	Desa	13	-	-	13	66.000	13	72.600	13	79.860	13	87.846	13	306.306	
			Jumlah kegiatan peningkatan toleransi	kegiatan	1	-	-	1	22.000	1	24.200	1	26.620	1	29.282	1	102.102	
			Jumlah kegiatan FKUB tingkat kecamatan	kegiatan	1	-	-	1	22.000	1	24.200	1	26.620	1	29.282	1	102.102	
			Jumlah paskribaka yang terfasilitasi	orang	1	-	-	1	110.000	1	121.000	1	133.100	1	146.410	1	510.510	
			Jumlah kegiatan keagamaan dan sosial budaya yang difasilitasi	kegiatan	13	-	-	13	11.000	13	12.100	13	13.310	13	14.641	13	51.051	
			Jumlah kegiatan festival seni budaya yang difasilitasi	kegiatan	1	-	-	1	11.000	1	12.100	1	13.310	1	14.641	1	51.051	
			Jumlah orang mengikuti pelaksanaan kegiatan daerah	kegiatan	120	-	-	120	11.000	120	12.100	120	13.310	120	14.641	120	51.051	

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat at daerah Penanggu jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
			Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Orang	140	-	-	140	44.000	140	48.400	140	53.240	140	58.564	140	204.204	
		Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	3	-	-	3	70.400	3	77.440	3	85.184	3	93.702	3	326.726	Kec. Gondan grejo
			Terpenuhinya fasilitasi pembinaan PKK	Bulan	12	-	-	12	22.000	12	24.200	12	26.620	12	29.282	12	102.102	
			Jumlah desa mengikuti musrenbang	Desa	13	-	-	13	22.000	13	24.200	13	26.620	13	29.282	13	102.102	
			Jumlah desa mengikuti lomba	Kegiatan	13	-	-	13	26.400	13	29.040	13	31.944	13	35.138	13	122.522	
		Fasilitasi dan Koordimasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordimasi Tata Pemerintahan	Kegiatan	7	-	-	7	100.200	7	99.220	7	109.142	7	120.056	7	428.618	Kec. Gondan grejo
			Jumlah desa mengikuti pembinaan perangkat desa	Desa	13	-	-	13	11.000	13	12.100	13	13.310	13	14.641	13	51.051	
			Jumlah desa mengikuti pembinaan kegiatan administrasi pemerintahan desa	Desa	13	-	-	13	11.000	13	12.100	13	13.310	13	14.641	13	51.051	
			Jumlah desa mengikuti penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Desa	1	-	-	1	10.000		0		0		0		10.000	
			Jumlah desa mengikuti fasilitasi pengisian kekosongan formasi jabatan	Desa	4	-	-	4	13.200	4	14.520	4	15.972	4	17.569	4	61.261	

Tujuan	Sasaran	Program dan kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat at daerah Penanggunjawa b
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	
			Jumlah pengurus RT dan RW mendapatkan pembinaan	Orang	130	-	-	130	22.000	130	24.200	130	26.620	130	29.282	130	102.102	
			Jumlah desa mengikuti monev alokasi dana desa	Desa	13	-	-	13	22.000	13	24.200	13	26.620	13	29.282	13	102.102	
			Jumlah desa mengikuti pembekalan anggota BPD	Desa	13	-	-	13	11.000	13	12.100	13	13.310	13	14.641	13	51.051	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Gondangrejo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja ini sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Gondangrejo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
2	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75
3	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	% wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	% wilayah tertib perda	%	100	100	100	100	100	100	100
6	% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
7	% Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	% kehadiran musrenbang	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Renstra menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Gondangrejo.

Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Renstra Tahun 2018-2023 telah selesai, sementara Renstra tahun 2024–2029 belum tersusun. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Gondangrejo agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Gondangrejo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Gondangrejo akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondangrejo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja

Kecamatan Gondangrejo wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Gondangrejo.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Gondangrejo, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Gondangrejo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO